

Jurnal HAM merupakan sebuah platform ilmiah yang bertujuan untuk mendiseminasikan dan mengembangkan hasil-hasil riset hak asasi manusia baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Mengingat studi hak asasi manusia banyak melibatkan elemen-elemen keilmuan yang bersifat interdisipliner, Jurnal HAM menerima submisi artikel ilmiah yang membahas hak asasi manusia dari lensa, namun tidak terbatas pada ilmu hukum, ilmu sosial, politik, bahasa, hubungan internasional, hingga komunikasi. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36/E/KPT/2019 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode VII Tahun 2019 tanggal 13 Desember 2019, menetapkan bahwa Jurnal HAM mendapatkan peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Peringkat 2 (dua) atau Sinta-2 (S2).

- Pembina : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
- Penanggung Jawab : Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Penelitian Hukum dan HAM
- Pengarah : 1. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum;
3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan;
- Pemimpin Redaksi
(*Editor*) : Firdaus, S.Sos., M.H.
- Anggota Dewan Redaksi
(*Section Editor*) : 1. Ahyar, S.H., M.H.
2. Eka N.A.M. Sihombing, S.H., M.Hum.
3. Dr. Irawati Handayani
4. Oki Wahyu Budijanto, S.E., M.M.
5. Harison Citrawan Damanik, S.H., LL.M.
6. Tony Yuri Rahmanto, S.H., M.H.
7. Okky Chahyo Nugroho, S.H., M.Si
8. Donny Michael, S.H., M.H.
- Redaksi Pelaksana : Fitriyani, S.H., M.Si.
- Sekretaris : 1. Lindung Budi Mulyawan, S.H.
2. M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P.
- Penyunting Tata Bahasa dan Naskah
(*Copyeditor*) : 1. Amirah Balqis S.H.
2. Novzel Ridho Abednego Hasugian
3. Mira Sukmawati
- Teknologi Sistem Informasi : 1. Machyudhie, S.T.
2. Mochamad Arip, S.Kom.
3. Harysandy Permana, S.Kom.
4. Agus Priyatna, S.Kom.

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Jl. HR Rasuna Said Kav. 4-5 Kuningan, Jakarta Selatan (12940)
Telepon (021) 2525015 (ext. 514); (021) 2522952; Faksimile (021) 2522952
E-mail: ejournalham@gmail.com / pusbangdatin@gmail.com

Percetakan

PT. Pohon Cahaya Jl. Mandala Raya Selatan No. 20 A-B
Jakarta Barat, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan 11440
Telepon: 081391694388

Catatan

Redaksi menerima naskah asli yang aktual dalam bidang Hak Asasi Manusia berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: Peneliti Hak Asasi Manusia, praktisi dan teoritis serta kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan hasil penelitian terbaru yang memuat data dan fakta serta pendapat para ahli maupun pribadi penulisnya, bukan merupakan pendapat redaksi.

Redaksi berhak tidak menerima, menyingkat naskah tulisan yang dikoreksi dari segi teknis penulisan sepanjang tidak mengubah isi tulisan. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 (tiga puluh) halaman A4 dan dikirim melalui E-mail: ejournalham@gmail.com/pusbangdatin@gmail.com serta wajib meng-upload tulisan tersebut melalui Open Journal System (OJS) pada e-journal. balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Covid-19 Sebagai Perwujudan Perlindungan HAM (<i>The State's Responsibility in the Case of COVID-19 As a Realization of the Protection of Human Rights</i>).....	349-366
Sholahuddin Al-Fatih, Felinda Istighfararisna Aulia	
Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan Bagi Masyarakat Riau (<i>Efforts To Fulfill the Right to The Environment to Forest Fires for The People of Riau</i>).....	367-384
Penny Naluria Utami, Yuliana Primawardani	
Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia (<i>The Role of International and Regional Organizations in Resolving Human Rights Violations of Human Trafficking in Indonesia</i>)	385-404
Iskandar, Nursiti	
Eksistensi Gerakan Sosial Pasangan Campur Antarnegara: Upaya Memperoleh Hak Untuk Menikah di Masa Pandemi (<i>The Existence of Bi-National Couple Social Movement: An Effort to Obtain the Right to marry in The Pandemic</i>).....	405-428
Dwi Bima Achmad Setyawan, Rizqi Ganis Ashari	
Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu) <i>Human Rights and Legal Assistance</i> (Legal Advocacy for drug abuse victims in Bengkulu City).....	429-448
Susiyanto, Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, Hendi Sastra Putra	
Kirpan Sikh: Antara Hak Kebebasan Beragama dan Hukum Nasional di Indonesia (<i>Sikh's Kirpan: Between The Rights of Religion and The National Law of Indonesia</i>).....	449-464
Hilmi Ardani Nasution	
Pemenuhan Hak Reparasi Bagi Korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk Memperkuat Ketahanan Nasional (<i>The Fullfilment of the Right to Reparation for Victims of the 1989 Talangsari Tragedy to Strengthen National Resilience</i>).....	465-484
Mutiara Sari Amran, Arthur Josias Simon Runturambi	
Ketimpangan antara Pemenuhan Hak Sipil dan Hak-Hak Lainnya pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeu, Cimahi (<i>The Gap Between Civil Rights and Other Rights Fulfilment Among Children of Sunda Wiwitan Minority Group of Cireundeu, Cimahi</i>)	485-502
Moh Zaenal Abidin Eko Putro, Kustini Kosasih	

Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan
dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia
(*Alternative Handling Sequences Waiting For Death Row Inmates In Prison
of Human Rights Construction*) 503-520

Firdaus, Okky Cahyo Nugroho, Oksimana Darmawan

HAK ASASI MANUSIA ATAU HAK MANUSIAWI?
(*Fundamental Human Rights or Human Rights*) 521-532

Carolus Boromeus Kusmaryanto

*The Indonesian Electronic Information and Transactions Within Indonesia's Broader Legal Regime:
Urgency for Amendment?*..... 533-552

**Travis Tio Pratama Waluyo, Elizabeth Calista, Danielle Putri Ratu, Tasya Safiranita Ramli,
Ahmad M. Ramli**

BIODATA PENULIS **xxi**

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga Redaksi dapat menerbitkan tulisan pada edisi kedua yaitu Jurnal HAM Volume 12 Nomor 3, Desember 2021. Seperti terbitan sebelumnya, pada edisi ini dimuat 11 (sebelas) tulisan karya tulis ilmiah yang merupakan hasil-hasil penelitian maupun tinjauan ilmiah para peneliti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM maupun penulis dari instansi lain.

Volume 12 Nomor 3, Desember 2021 kali ini, dibuka dengan tulisan yang mengulas isu terkini yaitu Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Covid-19 sebagai Perwujudan Perlindungan HAM. Ada juga tulisan yang membahas Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan bagi Masyarakat Riau, Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia, Eksistensi Gerakan Sosial Pasangan Campur Antarnegara: Upaya Memperoleh Hak untuk Menikah di Masa Pandemi, Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum, Kirpan Sikh: Antara Hak Kebebasan Beragama dan Hukum Nasional di Indonesia, Pemenuhan Hak Reparasi bagi Korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk Memperkuat Ketahanan Nasional, Ketimpangan antara Pemenuhan Hak Sipil dan Hak-Hak lainnya pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeu, Cimahi, Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?, dan *The Indonesian Electronic Information and Transactions Within Indonesia's Broader Legal Regime: Urgency for Amendment?*

Kiranya tulisan-tulisan tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang HAM bagi para pembaca. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI yang telah memberikan dukungan dalam penerbitan Jurnal HAM ini. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis. Kami juga menerima kritik dan saran dalam rangka peningkatan kualitas Jurnal HAM baik dari sisi pengelolaan *Open Journal System* maupun dari sisi materi tulisan. Selamat membaca.

Selamat Membaca

=REDAKSI=

HALAMAN KOSONG

**KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI
YANG TELAH MENELAAH NASKAH SEHINGGA DAPAT DITERBITKAN**

1. Prof. Dr. M. Alie Humaedi, M.A., M.Hum.
Pusat Riset Masyarakat dan Budaya, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial
Badan Riset dan Inovasi Nasional
2. Prof. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret
3. Dr. Herlambang Perdana, S.H., M.A.
Fakultas Hukum
Universitas Gadjah Mada
4. Prof. Dr. Agus Raharjo, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum
Universitas Jendral Soedirman
5. Dr. Hardianto Djanggih, S.H., M.H.
Universitas Muslim Indonesia Makassar
6. Dhiana Puspitawati, S.H., L.L.M., Ph.D.
Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
7. Nurhdayatuloh, SHI., Sp. PD., SH., LL.M., MH., MHI.
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
8. Eko Riyadi, S.H., M.H.
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

HALAMAN KOSONG

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Sholahuddin Al-Fatih, Felinda Istighfararisna Aulia (Faculty of Law, Muhammadiyah University Malang)

(The State's Responsibility in the Case of COVID-19 As a Realization of the Protection of Human Rights)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 3, December 2021, page 349-366

Covid-19 or Coronavirus Disease 2019 is a contagious disease that spreads very quickly and widely. The spread of the Covid-19 is a pandemic that causes many impact from various aspects of life. Such as health, economic, education and social perspective. Exactly, each country has a very serious and important role in handling this global pandemic. Every countries has responsibilities to fulfill the rights for each of their citizenship in whole of life aspects. This study aims to examine aspects of the state's responsibility for the protection and guarantee of human rights during the Covid-19 pandemic. This research benefit is to providing guidelines for stakeholders as an effort to fulfill the rights of citizens during the Covid-19 pandemic. The normative juridical research method is used in this research, by analyzing the sources of the literature study. The results found in this study indicate that the Government has basically made efforts to ensure the fulfillment of basic rights of citizens during the Covid-19 pandemic, especially in the health, economy and education rights. However, the Government need sto fulfill other basic rights, for example in the spiritual, socail dan cultural rights.

Keywords: covid-19; protection; responsibility; government; human rights

Penny Naluria Utami, Yuliana Primawardani (Law and Human Rights Research and Development Agency, Jakarta)

(Efforts To Fulfill the Right to The Environment to Forest Fires for The People of Riau)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 3, December 2021, page 367-384

Forest burning for new plantations causes environmental damage, one of which is the problem of smog which causes air pollution in Riau Province. Smoke pollution is prone to various diseases such as respiratory tract infections and so on. This paper aims to identify the factors causing haze pollution from forest and land fires and to find out efforts to fulfill the right to a good and healthy environment for the people of Riau against forest fire smoke pollution. This research is a descriptive analytic study with a normative juridical approach. The results of the research show that one of the factors causing forest and land fires is the condition of part of the forest consisting of peat swamps. The second factor is that many companies operate without environmental permits. Another factor causing forest fires is the overlapping of applicable regulations, both related to land use rights and forest areas. In this case, efforts to fulfill the right to a good and healthy environment for the people of Riau have been quite good, although not yet optimal. Therefore, there is a need for coordination and cooperation with various agencies to establish rules so that there is no overlapping of rules.

Keywords: fulfillment; right to the environment; forest fires.

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Iskandar, Nursiti (Sunan Gunung Djati State Islamic University, Bandung)

(The Role of International and Regional Organizations in Resolving Human Rights Violations of Human Trafficking in Indonesia)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 3, December 2021, page 385-404

Human Trafficking is a transnational crime. In 2019, KPPA recorded 213 cases and increased to 400 in 2020. This condition requires the state to take firm action to protect citizens, especially women and children, from being trapped in human trafficking. The purpose of this article is to analyze the role of international and regional organizations in helping to solve the problem of trafficking in person, the government and law enforcement officers in resolving the criminal act of trafficking in persons in Indonesia, and efforts to protect victims of trafficking in person. This study uses a normative juridical research method with a literature review. The primary legal material used is law number 21 of 2007 concerning the crime of trafficking in persons (TPPO). The study shows that IOM and ASEAN have made various efforts to resolve this through facilitation of regulation-making, diplomacy between transit and destination countries, coordination between ministries and the police for fast and appropriate action. The TPPO law does not generate a deterrent effect since it provides low sanctions. The government must improve the prevention system and victims protection and change the law so that its punishment can deter perpetrators.

Keywords: *victim protection; organizational role; trafficking.*

Dwi Bima Achmad Setyawan, Rizqi Ganis Ashari (Class I Immigration Office for TPI Ngurah Rai, Bali)

(The Existence of Bi-National Couple Social Movement: An Effort to Obtain the Right to marry in The Pandemic)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 3, December 2021, page 405-428

Bi-national couples who were not accommodated by immigration policies were forming a #loveisnottourism movement on social media. This article aims to describe the various factors behind the emergence of the social movement #loveisnottourism and the fulfillment of right to marry under the governing legislation of human rights in Indonesia during the pandemic. Through descriptive qualitative research methods and normative juridical approaches, in order to analyze primary legal data and secondary data, found the factors behind this movement. The trigger factors of #loveisnottourism social movements were identified as personal factors and external factors. The absence of immigration facilities for bi-national couples to meet and carry out marriages was a manifestation of the positive legal doctrine on human rights in Indonesia, which classified the right to marry in the pandemic as derogable rights. The marry rights might be limited by the state considering the circumstance state health and security issues due to the Covid-19 spread. This article recommends the need for a transparent explanation from the manifestation of the positive doctrine if the right to marry is a derogable right thus the fulfillment enables be limited.

Keywords: *bi-national couples; covid-19; human rights; #loveisnottourism; social movement.*

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge*

Susiyanto, Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, Hendi Sastra Putra (Muhammadiyah University Bengkulu)

(Human Rights and Legal Assistance - Legal Advocacy for drug abuse victims in Bengkulu City)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 3, December 2021, page 429-448

In addition to consumers, adolescents are used as a means of distributing narcotics at school level and drug trafficking, some adolescents who are arrested as dealers do not know what they are suspected of. The obligation to provide legal assistance to poor people or groups through lawyers is consistent with the principle of justice for all and the right to be accompanied by lawyers without exception. In a criminal justice system that has not yet reached the point of integration, the defense of poor people or groups is required. The purpose of this study is to determine the role and support of lawyers in legal aid for drug abuse suspects. With an empirical legal approach by looking at the facts, both verbal and real behavior carried out through direct observation. The results of the study indicate that, information related to the provision of free law (prodeo) has not been maximized so that there are still many narcotics users who are in conflict with the law and do not get legal assistance/assistance, thus causing the powerlessness of narcotics users. There is a need for provisions to provide legal assistance to suspects and defendants who are suspected and charged with committing a criminal act with a criminal penalty of less than 5 (five) years.

Keywords: legal aid; suspects rights; drug abuse.

Hilmi Ardani Nasution (Law and Human Rights Research and Development Agency)

(Sikh's Kirpan: Between the Rights of Religion and The National Law of Indonesia)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 3, December 2021, page 449-464

The Sikhism is included in the ten largest religions in the world. Sikhs in Indonesia have existed since the pre-independence era. One of the characteristics of their worship and religious symbols is to wear kirpan on various occasions. Based on its physical characteristics, the kirpan is often considered as a sharp weapon in which it has legal offence. A kirpan is a symbol that must be worn by Sikhs related to the implementation of their beliefs. The problem arises when the use of Kirpan by Sikhs can be penalized because Indonesian regulations do not accommodate the ownership of sharp weapons for religious purposes. This study uses a normative method which is library research. The primary sources of this research come from norms and regulations that regulate religious freedom and sharp weapons.. This paper finds that several laws pose a threat to Sikhs who wear kirpan. Adjustment of various regulations related to the issue of kirpan as a symbol and part of the Sikh worship procedure needs to be done. This step will prevent Sikhs from being threatened with criminality and create an atmosphere of freedom in implementing religious values in Indonesia, which is theoretically protected by human rights values.

Keywords: sikh; religion; kirpan; human rights; weapon.

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Mutiara Sari Amran, Arthur Josias Simon Runturambi (The School of Strategic and Global Studies)

(The Fullfilment of the Right to Reparation for Victims of the 1989 Talangsari Tragedy to Strengthen National Resilience)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 3, December 2021, page 465-484

This research aims to analyze the fulfilment of the right to reparation for victims of the 1989 Talangsari Tragedy to strengthen national resilience and the synchronization of the policies taken by The Central Government and Local Government in the fulfillment of the right to reparation for victims of the 1989 Talangsari Tragedy. It uses qualitative methods such as interviews and literature review. This research shows that the fulfillment of the right to reparation that can strengthen national resilience is material reparations such as giving compensation, economic empowerment, educational support such as scholarship, infrastructure development, and health services such as trauma healing. Moreover, symbolic reparation, such as a memorial program, is also needed to build collective memory so that the violation is not repeated. Furthermore, this research also shows that some policies that the Central Government and Local Government take have made positive impacts on the victims of the 1989 Talangsari Tragedy. Nevertheless, there are some flaws in the policies that have been conducted. Therefore, an alternative policy is necessary to optimize the fulfillment of the right to reparation for victims of the 1989 Talangsari Tragedy and other alleged gross violations of human rights in Indonesia.

Keywords: the right to reparation; gross violations of human rights; national resilience.

Moh Zaenal Abidin Eko Putro, Kustini Kosasih (Jakarta State Polytechnic Research and Development Agency and Training and Education Ministry of Religion)

(The Gap Between Civil Rights and Other Rights Fulfillment Among Children of Sunda Wiwitan Minority Group of Cireundeu, Cimahi)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 3, December 2021, page 485-502

Fulfillment of children's rights from minority groups is still a significant issue regarding the implementation of the Law on Child Protection. Minority groups with their basis on indigenous religion is interestingly known in terms of how far they fulfil their children's rights. Sunda Wiwitan group in Cireundeu Cimahi, West Java, is a minority group that still experiences children's rights fulfillment problem. As a result of a qualitative approach, this article seeks to explore children's rights fulfillment in this community. The results show that the rights of children of Sunda Wiwitan Cireundeu are not completely ignored. Their right to express their identity, have education, welfare, and health service and be free from bullying has been fulfilled. However, their civil rights seems to be ignored. It creates some problems such as children with no birth certificate, two types of ID cards (KTP), unwanted birth certificate entries and abuse of birth certificates provision. Through the Department of Population and Civil Registration of Cimahi City, the Ministry of Home Affairs should pay attention to standards in managing civil rights documents for members of the Sunda Wiwitan Cireundeu.

Keywords: children rights; civil rights; minority group; sunda wiwitan.

The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in writing.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Firdaus, Okky Chahyo Nugroho, Oksimana Darmawan (Law and Human Rights Research and Development Agency, Jakarta)

(Alternative Handling Sequences Waiting For Death Row Inmates In Prison Of Human Rights Construction)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 3, December 2021, page 503-520

The phenomenon of waiting for death row is not only a waiting period for death row convicts in the process of submitting legal remedies for clemency requests to the President, but also becomes a separate form of punishment for those sentenced to death. The research problem discusses three things. First, what are the alternatives for handling death row waiting lines from the point of view of human rights, namely civil and political rights (right to life), economic, social and cultural rights (right to mental health)? Second, what efforts have been made by the Correctional Institution to fulfill the basic rights of death row inmates? Third, what are the other alternatives in handling the waiting series phenomenon? The method used is empirical juridical research which is a sociological legal research by conducting interviews and literature studies. The result of this research indicates that an alternative criminal that can replace the death penalty and the challenge of its application is to return to the purpose of punishment as a social correction where this is not only punishing inmates. There is a need to change in the law enforcement system, including related institutions. An alternative challenge to the death penalty is the government's political will by prioritizing the human rights of those sentenced to death. In addition, the fulfillment of the mental health rights of death convicts must be supported by mental health professionals.

Keywords: alternatives; death, row; fulfillment; human rights.

Carolus Boromeus Kusmaryanto (Postgraduate Sanata Dharma University, Yogyakarta)

(Fundamental Human Rights or Human Rights)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 3, December 2021, page 521-532

The translation of human rights in Bahasa Indonesia is not correct. There are two terminologies which is interwind: human rights and fundamental human rights. Unfortunately, the two terminologies are translated exactly in the opposite way: human rights in Bahasa Indonesia is translated into fundamental human rights (hak asasi manusia). This wrong translation has big impact in understanding and practicing human rights. This article tries to correct it by demonstrating the different meaning of human rights and fundamental human rights. This article also gives new panorama of understanding that the fundamental human rights is right to life. The violation of human rights is not automatically a crime if the violation of human rights is for the sake of defending fundamental human rights (right to life). So, in Bahasa Indonesia human rights must be translated into hak manusiawi and not hak asasi manusia (fundamental human rights) so that terminology correctly indicates the meaning.

Keywords: correct terminology; fundamental human rights; human right; right to life.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel**Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Travis Tio Pratama Waluyo, Elizabeth Calista, Danielle Putri Ratu, Tasya Safiranita Ramli, Ahmad M. Ramli (*Center for Cyber Law and Digital Transformation Studies, Faculty of Law, Universitas Padjadjaran Bandung*)

(The Indonesian Electronic Information and Transactions Within Indonesia's Broader Legal Regime: Urgency for Amendment?)

Human Rights Journal, Volume 12, Number 3, December 2021, page 533-552

Cyberspace is the interdependent network of information technology infrastructures such as the internet, telecommunications networks, and computer systems. Meanwhile, Indonesia's Law Number 11 of 2008 and its amendment through Indonesian Law Number 19 of 2016 governing cyberspace have been viewed to contradict and infringe other areas of law, such as protection of press or freedom of expression. Hence, this study seeks to identify the controversies and problems regarding the law deemed urgent for amendment. Further, this study creates recommendations so the government may amend electronic information policy more fairly and efficiently. This study uses a judicial normative and comparative approach. This research tries to analyze the existing regulations and the implementation and compare Indonesia's cyberspace regulation with other States'. This study finds that Articles 27(3) and 28(2) of the law criminalize defamation and hate speech in an overly broad manner and that Article 40(2)(b) allows the government to exercise problematic censorship. As a result, they have infringed the freedom of the press and general freedom of expression in practice. In response to this, this study compares similar provisions from other States and recommends amendment the articles to become narrower and more clearly defined.

Keywords: *cyber law; Indonesian electronic information and transaction law; freedom of the press; freedom of expression; legal reform.*

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Sholahuddin Al-Fatih, Felinda Istighfararisna Aulia (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang)

Tanggung Jawab Negara dalam Kasus Covid-19 sebagai Perwujudan Perlindungan HAM

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hal 349-366

Covid-19 atau Coronavirus Disease 2019 merupakan penyakit yang mudah menular dengan cepat dan luas. Penyebaran Covid-19 menimbulkan banyak dampak dari berbagai aspek kehidupan. Seperti aspek kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial. Setiap negara memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan pandemi global ini sehingga negara memiliki kewajiban pemenuhan hak asasi untuk warga negaranya dalam beragam aspek kehidupan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek tanggungjawab negara terhadap perlindungan dan jaminan HAM selama pandemi Covid-19. Penelitian ini akan memberikan pedoman bagi para stakeholders untuk memenuhi hak asasi warga negara selama pandemi Covid-19. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan telaah bersumber pada studi kepustakaan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah telah berupaya menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga selama pandemi Covid-19, terutama dalam sektor kesehatan, ekonomi dan pendidikan. Namun, Pemerintah perlu untuk memenuhi hak-hak dasar yang lain, misalnya dalam sektor spiritual, sosial maupun budaya.

Kata Kunci: covid-19; perlindungan; tanggungjawab; pemerintah; HAM.

Penny Naluria Utami, Yuliana Primawardani (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta)

Upaya Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Terhadap Kebakaran Hutan Bagi Masyarakat Riau

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hal 367-384

Pembakaran hutan untuk perkebunan baru menyebabkan kerusakan lingkungan, termasuk masalah kabut asap yang menimbulkan pencemaran udara di Provinsi Riau. Selain itu, polusi asap rentan menyebabkan berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan dan sebagainya. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pencemaran asap kebakaran hutan dan lahan serta mengetahui upaya pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Riau terhadap polusi asap kebakaran hutan. Riset ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil riset menunjukkan bahwa salah satu faktor penyebab adanya kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi sebagian hutan yang terdiri dari rawa gambut. Faktor kedua adalah banyak perusahaan yang beroperasi tanpa izin lingkungan. Faktor lain penyebab kebakaran hutan adalah tumpang tindihnya peraturan yang berlaku terkait hak guna usaha dan kawasan hutan. Dalam hal ini, upaya untuk pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat Riau sudah cukup baik, tetapi hal ini belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dan Kerjasama dengan berbagai instansi untuk menetapkan aturan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.

Kata Kunci: pemenuhan; hak atas lingkungan; kebakaran hutan.

**Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Iskandar, Nursiti (UIN Sunan Gunung Djati, Bandung)

Peran Organisasi Internasional dan Regional dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang di Indonesia

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hal 385-404

Perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional. Tahun 2019, KPPA mencatat 213 kasus dan meningkat menjadi 400 kasus pada tahun 2020. Kondisi ini mewajibkan negara mengambil tindakan tegas untuk melindungi warga negara khususnya perempuan dan anak agar tidak terjebak dalam perdagangan orang. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis peran organisasi internasional dan regional dalam mengatasi persoalan perdagangan orang, peran pemerintah dan aparat penegakan hukum dalam penyelesaian tindak pidana perdagangan orang di Indonesia serta upaya perlindungan kepada korban perdagangan orang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan kajian kepustakaan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hasil penelitian menunjukkan bahwa IOM dan ASEAN telah melakukan berbagai upaya untuk penanganan perdagangan orang melalui fasilitasi pembuatan regulasi, diplomasi antar negara transit dan negara tujuan, koordinasi antar kementerian dan kepolisian untuk penindakan secara cepat dan tepat. UU TPPO tidak menimbulkan efek jera karena memberikan sanksi rendah. Pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban, serta menetapkan hukuman yang dapat menjerakan pelaku.

Kata Kunci: perlindungan korban; peran organisasi; *trafficking*.

Dwi Bima Achmad Setyawan, Rizqi Ganis Ashari (Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali)

Eksistensi Gerakan Sosial Pasangan Campur Antarnegara: Upaya Memperoleh Hak Untuk Menikah di Masa Pandemi

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hal 405-428

Pasangan campur antarnegara yang tidak terakomodasi oleh kebijakan keimigrasian membentuk gerakan *#loveisnottourism* di media sosial. Artikel ini bertujuan mendeskripsikan berbagai hal yang melatarbelakangi munculnya gerakan sosial *#loveisnottourism* dan pemenuhan hak untuk menikah dalam konteks undang-undang yang mengatur hak asasi di Indonesia saat pandemi. Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan yuridis normative dengan menganalisis data hukum primer dan data sekunder. Faktor pemicu gerakan sosial *#loveisnottourism* dikategorikan menjadi faktor personal dan faktor eksternal. Ketiadaan fasilitas keimigrasian bagi pasangan campur untuk bertemu dan melaksanakan pernikahan merupakan pengejawantahan doktrin positif hukum tentang hak asasi di Indonesia, yang mengkategorisasikan hak untuk menikah di saat pandemi sebagai bagian dari *derogable rights*. Hak tersebut dapat dibatasi pemenuhannya oleh negara dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keamanan negara dari sebaran Covid-19. Artikel ini merekomendasikan perlunya penjelasan yang transparan mengenai doktrin positif hak untuk menikah sebagai *derogable rights* sehingga pemenuhannya dapat dibatasi.

Kata Kunci: pasangan campur; covid-19; hak asasi manusia; *#loveisnottourism*; gerakan sosial.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Susiyanto, Mikho Ardinata, Sinung Mufti Hangabei, Hendi Sastra Putra (Universitas Muhammadiyah Bengkulu)

Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hal 429-448

Selain pemakai, remaja dijadikan sebagai perantara untuk mengedarkan narkoba di tingkat sekolah. Beberapa remaja yang ditangkap sebagai pengedar tidak mengetahui mengenai apa yang disangkakan. Kewajiban memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh advokat sejalan dengan prinsip *justice for all* dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Dalam sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan, pembelaan bagi orang atau kelompok miskin tetap diperlukan. Tulisan ini membahas mengenai peran pengacara dalam hal pendampingan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum empiris dengan mengamati perilaku verbal maupun nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis belum maksimal. Masih banyak pengguna narkoba yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/bantuan hukum yang menimbulkan ketidakberdayaan. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.

Kata Kunci: bantuan hukum; hak tersangka; penyalahgunaan narkoba.

Hilmi Ardani Nasution (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM)

Kirpan Sikh: Antara Hak Kebebasan Beragama dan Hukum Nasional di Indonesia

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hal 449-464

Agama Sikh termasuk dalam sepuluh agama terbesar di dunia. Penganut Sikh di Indonesia pun sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Salah satu ciri khas peribadatan dan simbol keagamaan adalah mengenakan kirpan pada berbagai kesempatan. Berdasarkan ciri fisiknya, Kirpan sering dianggap sebagai senjata tajam yang di dalamnya melekat delik hukum (pidana). Kirpan adalah suatu simbol yang wajib dikenakan oleh pemeluk Sikh terkait dengan penerapan kepercayaannya. Permasalahan muncul ketika penggunaan Kirpan oleh pemeluk Sikh dapat dipidana karena peraturan di Indonesia belum mengakomodir kepemilikan senjata tajam dengan tujuan keagamaan. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Sumber primer penelitian ini berasal dari norma dan peraturan yang mengatur terkait kebebasan beragama dan senjata tajam. Tulisan ini menemukan bahwa beberapa undang-undang mengancam pemeluk Sikh yang mengenakan Kirpan. Penyesuaian berbagai peraturan terkait persoalan kirpan sebagai simbol dan bagian tata cara peribadatan Sikh perlu dilakukan. Langkah ini akan menghindari pemeluk agama Sikh dari ancaman pidana dan menciptakan atmosfer kebebasan dalam menerapkan nilai-nilai agama di Indonesia yang secara teori dilindungi dalam nilai-nilai hak asasi manusia.

Kata Kunci: sikh; agama; kirpan; hak asasi manusia; senjata tajam.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel**Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya****Mutiara Sari Amran, Arthur Josias Simon Runturambi (Sekolah Kajian Strategik dan Global)*****Pemenuhan Hak Reparasi Bagi Korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk Memperkuat Ketahanan Nasional****Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hal 465-484*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 untuk memperkuat ketahanan nasional dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak reparasi yang dapat memperkuat ketahanan nasional di antaranya adalah reparasi materiil berupa pemberian ganti rugi, pemberdayaan ekonomi, bantuan pendidikan seperti beasiswa, pembangunan infrastruktur, serta pemberian layanan kesehatan berupa penyembuhan trauma. Selain itu, reparasi simbolik berupa program memorialisasi juga diperlukan untuk membangun kolektif memori agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa hingga saat ini, beberapa kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan dampak positif bagi korban Peristiwa Talangsari 1989. Meskipun demikian, terdapat beberapa kelemahan dalam proses pemulihan yang telah dilakukan. Perlu adanya suatu alternatif kebijakan untuk memaksimalkan pemenuhan hak reparasi bagi korban Peristiwa Talangsari 1989 dan dugaan peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM berat lainnya di Indonesia.

Kata Kunci: hak reparasi; pelanggaran HAM berat; ketahanan nasional.**Moh Zaenal Abidin Eko Putro, Kustini Kosasih (Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Kampus UI Jakarta Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI)*****Ketimpangan Antara Pemenuhan Hak Sipil dan Hak-Hak Lainnya pada Anak Sunda Wiwitan, Cireundeu, Cimahi****Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hal 485-502*

Pemenuhan hak-hak anak kelompok minoritas tetap menjadi tema signifikan terkait implementasi UU tentang Perlindungan Anak. Kelompok minoritas dengan berlandaskan agama adalah hal yang menarik untuk diketahui terkait sejauh mana pemenuhan hak-hak anak di kalangan mereka. Kelompok penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cireundeu, Cimahi, Jawa Barat merupakan kelompok minoritas yang masih mengalami hambatan perlindungan hak-hak anak. Sebagai hasil pendekatan kualitatif, artikel ini berupaya menggali upaya perlindungan hak-hak anak di komunitas ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak penghayat Sunda Wiwitan Cireundeu tidak sepenuhnya terabaikan. Hak untuk mengekspresikan identitas diri, memiliki pendidikan, kesejahteraan dan pelayanan kesehatan serta hak terbebas dari perundungan telah terpenuhi dengan baik. Meskipun demikian, hak-hak sipil mereka tampak belum terpenuhi. Hal ini menciptakan beberapa masalah yaitu adanya anak yang belum memiliki akte kelahiran, dua model KTP kepercayaan, hasil pengisian akte kelahiran yang tidak dikehendaki serta praktik pengurusan akte yang tidak berlaku. Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi, Kementerian Dalam Negeri semestinya memperhatikan standar dalam pengurusan dokumen administrasi sipil warga penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan Cireundeu.

Kata Kunci: hak-hak anak; hak-hak sipil; kelompok minoritas; sunda wiwitan

Kata Kunci Bersumber dari Artikel
Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya

Firdaus, Okky Cahyo Nugroho, Oksimana Darmawan (Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Jakarta)

Alternatif Penanganan Deret Tunggu Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan dalam Konstruksi Hak Asasi Manusia

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hal 503-520

Fenomena deret tunggu eksekusi mati bukan hanya menjadi masalah terpidana mati dalam proses pengajuan upaya hukum permohonan grasi ke Presiden, tetapi juga menjadi bentuk penghukuman tersendiri bagi para terpidana mati. Rumusan masalah membahas tiga hal. *Pertama*, bagaimana alternatif penanganan deret tunggu terpidana mati dari sudut pandang hak asasi manusia yaitu hak sipil politik (hak hidup) hak ekonomi, sosial dan budaya (hak kesehatan jiwa)? *Kedua*, apa upaya yang telah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak dasar terpidana mati? *Ketiga*, bagaimana alternatif lainnya dalam penanganan fenomena deret tunggu? Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang merupakan penelitian hukum sosiologis dengan melakukan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alternatif pidana yang dapat menggantikan pidana mati dan tantangan penerapannya yaitu kembali ke tujuan pemidanaan sebagai koreksi sosial dimana hal ini tidak hanya menghukum narapidana. Perlu terdapat perubahan dalam sistem penegakan hukum termasuk institusi terkait. Tantangan alternatif pengganti pidana mati adalah *political will* dari pemerintah dengan mengedepankan hak asasi manusia terpidana mati. Selain itu, pemenuhan hak kesehatan jiwa terpidana mati harus didukung oleh tenaga profesional tentang kejiwaan.

Kata Kunci: alternatif; pidana; mati; pemenuhan; hak asasi manusia.

Carolus Boromeus Kusmaryanto (Pascasarjana Universitas Sanata Dharma dan Sekolah Pascasarjana Lintas Disiplin UGM, Yogyakarta)

Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hal 521-532

Terjemahan *human rights* ke dalam bahasa Indonesia adalah tidak tepat. Ada dua istilah yang saling berkaitan yakni *human rights* (hak manusiawi) dan fundamental human rights (hak asasi manusia). Sayangnya, dua istilah tersebut itu diterjemahkan persis terbalik. Istilah "*Human rights*" dalam Bahasa Indonesia diartikan dengan memakai istilah "*fundamental human rights*." Terjemahan yang salah ini berdampak besar pada pemahaman dan penerapan human rights. Artikel ini berusaha untuk mengoreksi kesalahan terjemahan itu dengan menunjukkan perbedaan makna antara hak manusiawi dengan hak asasi manusia. Artikel ini juga memberikan panorama baru bahwa hak asasi manusia itu yang paling fundamental adalah hak hidup. Pelanggaran hak manusiawi itu tidak otomatis menjadi suatu kejahatan apabila pelanggaran hak manusiawi itu dilakukan dengan alasan untuk mempertahankan hak asasi manusia yakni hak hidup. Jadi, dalam bahasa Indonesia, *human rights* seharusnya diterjemahkan menjadi hak manusiawi dan bukan "hak asasi manusia" sehingga terdapat keselarasan antara terminologi dan maknanya.

Kata Kunci: hak asasi manusia; hak hidup; hak manusiawi; terminologi yang benar.

Kata Kunci Bersumber dari Artikel**Lembar Abstrak ini Dickey Tanpa Izin dan Biaya**

Travis Tio Pratama Waluyo, Elizabeth Calista, Danielle Putri Ratu, Tasya Safiranita Ramli, Ahmad M. Ramli (Center for Cyber Law and Digital Transformation Studies, Faculty of Law, Universitas Padjadjaran Bandung)

The Indonesian Electronic Information and Transactions Within Indonesia's Broader Legal Regime: Urgency for Amendment?

Jurnal HAM, Volume 12, Nomor 3, Desember 2021, hal 533-552

Cyberspace adalah jaringan infrastruktur teknologi informasi yang saling bergantung seperti internet, jaringan telekomunikasi dan sistem komputer. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan melalui perubahannya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait dinilai bertentangan dan melanggar perlindungan pers atau kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi kontroversi dan permasalahan mengenai undang-undang yang dianggap mendesak untuk diubah. Selanjutnya, penelitian ini memberikan rekomendasi agar undang-undang tersebut dapat memuat pengaturan mengenai informasi elektronik secara lebih adil dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa regulasi yang ada dan implementasinya serta membandingkan regulasi cyberspace di Indonesia dengan negara-negara lain. Studi ini menemukan bahwa Pasal 27(3) dan 28(2) undang-undang tersebut telah mengakibatkan kriminalisasi terhadap terduga pelaku pencemaran nama baik dan ujaran kebencian terlalu luas dan Pasal 40(2)(b) memungkinkan pemerintah untuk melakukan sensor yang problematik. Dalam praktiknya, hal ini telah melanggar kebebasan pers dan kebebasan berekspresi secara umum. Menanggapi hal ini, penelitian ini membandingkan ketentuan serupa dari negara-negara lain dan merekomendasikan perubahan pada pasal-pasal tersebut agar lebih jelas dan cakupannya lebih sempit.

Kata Kunci: hukum siber; hukum informasi dan transaksi elektronik Indonesia; kebebasan pers; kebebasan berekspresi; reformasi hukum.